

KAPASITAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENYEDIAAN TAMAN TEMATIK GUNA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI

Jurnal Pengembangan Kota (2018)

Volume 6 No. 1 (9–16)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.6.1.9–16

Rani Widyahantari*, Iwan Rudiarto

Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro

Abstrak. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan tuntutan dasar yang jika tidak dipenuhi maka dapat menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan kota dan keseimbangan ekologi. Pemerintah Kota Bandung berupaya memenuhi RTH dengan membangun taman tematik yakni taman yang diberi daya tarik agar dapat merubah taman yang semula pasif menjadi taman aktif. Taman tematik dibangun untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga serta mewadahi aktivitas komunitas dalam rangka mewujudkan kota layak huni. Sebanyak 30 taman tematik telah dibangun namun lokasinya masih terfokus di pusat kota. Penelitian ini melihat kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan taman tematik yang dianalisis dengan menggunakan kerangka tata kelola ruang publik meliputi komposisi, pemangku kepentingan, sarana serta tugas pemerintah. Dalam mewujudkan kota layak huni, pemerintah harus memegang peran utama dengan melakukan kolaborasi bersama *stakeholders* lainnya untuk percepatan penyediaan ruang publik terutama dalam hal anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Kota Bandung cukup baik terutama dalam hal anggaran dan SDM, namun ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama sehingga belum dapat menyediakan taman tematik yang merata di seluruh wilayah Kota Bandung.

Kata kunci: kapasitas; pemerintah; taman tematik; kota layak huni

[Title: Capacity of Bandung City Government in Providing Thematic Parks to Create Livable City] Green Open Space (GOS) is a basic requirement which if not provided proportionally then it will show the inability of government in improving quality of urban life and creating ecological balance. Local Government of Bandung City attempted to fulfill its GOS by building thematic parks, park which added by unique theme so it transformed from passive into active park. Thematic parks also built to improve citizen's happiness index and to accommodate community activities towards livable city. 30 thematic parks have been built located in downtown area. This paper observed the capacity of local government in providing thematic parks using Public Space Governance Framework (PSGF) with four major components i.e governance structure, stakeholders, governing tools and governing tasks. To create a livable city, the government must play a major role by collaborating with other stakeholders to accelerate the provision of public space, especially in terms of budget. The findings reveal that the capacity of local government is quite good, especially in terms of budget and human resources. The availability of land is still a major obstacle therefore its provision is not evenly distributed yet throughout Bandung City.

Keyword: capacity; government; thematic park; livable city

Cara mengutip: Widyahantari, R., & Rudiarto, I. (2018). Kapasitas Pemerintah Kota Bandung dalam Penyediaan Taman Tematik Guna Mewujudkan Kota Layak Huni. *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol 6 (1): 9–16. DOI: 10.14710/jpk.6.1.9–16

1. PENDAHULUAN

Kota merupakan tempat untuk hidup, bekerja dan bermain sehingga ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas merupakan syarat utama, salah satunya adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Konsep kota ideal atau kota layak huni merupakan sebuah gambaran suasana kota yang nyaman dimana aspek fisik maupun nonfisik dapat

menunjang aktivitas sosial dan ekonomi warga

ISSN 2337-7062 (Print), 2503-0361 (Online) © 2018

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2018

*Email: rani.w@puskim.pu.go.id

Diterima 8 Mei 2018, disetujui 8 Juni 2018

(Nugraha & Heston, 2017). Kota pada saat ini terhubung secara global namun tidak terhubung secara lokal, sehingga untuk dapat menjadi kota yang layak huni, kota tersebut harus dapat menyediakan penghidupan yang layak bagi warganya dengan tetap dapat menjaga kualitas lingkungan (Evans, 2002).

Keberadaan taman di suatu kota dapat menjadi salah satu indikator keberpihakan kota terhadap lingkungan. Humaida, Prasetyo, dan Rushayati (2016) menyebutkan bahwa keberadaan RTH dapat menjadi penilaian tingkat kenyamanan sebuah kota karena keberadaannya dapat menyerap unsur-unsur negatif yang ditimbulkan dari aktivitas perkotaan. Penghijauan di lingkungan kota dapat meningkatkan kualitas kehidupan karena warganya dapat hidup erat dengan alam serta dapat mengerti fungsi ekosistem (Frick & Mulyani, 2006). Sejalan dengan hal tersebut, Ramdhoni, Rushayati, dan Prasetyo (2016) menjelaskan bahwa taman kota dapat memberi manfaat baik langsung dan tidak langsung seperti kesehatan, perasaan aman, nyaman, segar dan memberikan unsur estetis pada wilayah kota. Keberadaan taman di kota sangat penting karena dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kenyamanan hidup masyarakat kota sekaligus sebagai penyeimbang kehidupan perkotaan (Kusumawanto & Astuti, 2014).

Saat ini peran taman kota tidak hanya sebagai pemenuhan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan saja, namun taman kota dapat berfungsi lain yakni sebagai tempat untuk rekreasi, bersosialisasi, meditasi bahkan atraksi bagi turis (Razak, Othman, & Nazir, 2016). Lebih lanjut Dzhambov dan Dimitrova (2014) menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara ketersediaan ruang hijau di perkotaan dengan meningkatnya kesehatan fisik dan mental masyarakat. Oleh karena itu, taman kota yang dibangun sebaiknya tidak hanya digunakan pada satu waktu saja namun digunakan dalam berbagai fase kehidupan. Seperti yang disebutkan Woolley (2003) bahwa taman kota seharusnya dapat digunakan dalam setiap tahap perjalanan seseorang, mulai dari kehidupan ketika masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa hingga masa akhir hidupnya. Dengan demikian, perencana kota dan pembuat kebijakan harus dapat melihat taman sebagai kebutuhan

masyarakat dengan memperhatikan preferensi masyarakat.

Kota Bandung sebagai kota terbesar keempat di Indonesia saat ini mulai menunjukkan perhatiannya dalam pemenuhan RTH dengan membangun berbagai taman tematik secara intensif. Menurut RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, kota Bandung di masa mendatang diarahkan menjadi *green city*, dimana elemen taman atau RTH akan tersedia secara proporsional. Kemunculan taman-taman tematik juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kota Bandung sebagai *livable and lovable city* dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat dengan membuat mereka dapat pergi keluar rumah untuk menikmati ruang terbuka publik (Nururrohmah & Suhirman, 2016). Kota Bandung menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penilaian *Indonesian most livable city index* 2017 oleh IAP. Pada tahun 2011 Kota Bandung berada pada *bottom tier* (kota dengan *index livability* di bawah rata-rata), namun pada tahun 2014 meningkat menjadi *average tier* (kota dengan *index livability* rata-rata) dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2017 (IAP, 2017). Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan taman tematik yang menunjang salah satu poin penilaian *livable city* tentang ketersediaan ruang terbuka publik.

Taman tematik pada dasarnya hampir sama seperti taman kota pada umumnya, perbedaannya terdapat pada konsepnya dimana pada setiap taman diberikan tema yang spesifik. Pembangunan taman tematik merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan memberi nuansa baru pada taman sehingga dapat menjadi ikon Kota Bandung dan menimbulkan daya tarik bagi masyarakat kota maupun pendatang. Taman tematik yang dibangun merupakan revitalisasi taman-taman lama yang lokasinya sebagian besar terletak di pusat Kota Bandung sehingga keberadaannya belum tersebar diseluruh wilayah. Padahal menurut Tan dan Samsudin (2017) penyediaan taman yang hanya terfokus pada suatu wilayah saja dapat memicu kesenjangan antar kelompok.

Saat ini penyediaan RTH perkotaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun juga dari kontribusi berbagai *stakeholders* dan

peran lainnya dengan manajemen yang kompleks (Zamanifard, Alizadeh, & Bosman, 2018). Lebih lanjut Nururrohmah dan Suhirman (2016) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama bagi penyediaan kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya. Pemerintah memiliki peran yang penting walaupun sebenarnya mereka bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan karena sebagian besar proyek tersebut berorientasi non-profit. Indikator utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja ruang hijau perkotaan adalah kekuatan pemerintah, kondisi masyarakat, pelaksanaan dan peraturan (Azadi, Ho, Hafni, Zarafshani, & Witlox, 2011).

Penelitian-penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa penyediaan RTH perkotaan tetap menjadi tanggung jawab utama pemerintah, walaupun diperlukan pelibatan pihak-pihak lain agar dalam prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan baik. Peran pemerintah dalam penyediaan ruang publik berupa taman sangat penting dalam rangka mewujudkan kota yang layak huni. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kapasitas Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan RTH perkotaan yakni taman tematik. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran kemampuan pemerintah setempat dalam penyediaan ruang publik sehingga kemudian dapat melakukan optimalisasi dan mengatasi kendala yang ada dalam rangka mewujudkan Bandung sebagai kota layak huni.

2. METODE PENELITIAN

Analisa kapasitas pemerintah dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada kerangka tata kelola ruang publik (*Public Space Governance Framework*) yang mencakup empat komponen utama yakni komposisi, pemangku kepentingan, tugas pemerintahan dan sarana pemerintahan (Zamanifard dkk., 2018). Data penelitian diperoleh melalui telaah dokumen yang terkait perencanaan dan pelaporan taman tematik serta wawancara dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung yang

merupakan SKPD yang ditugaskan dalam pengelolaan taman tematik.

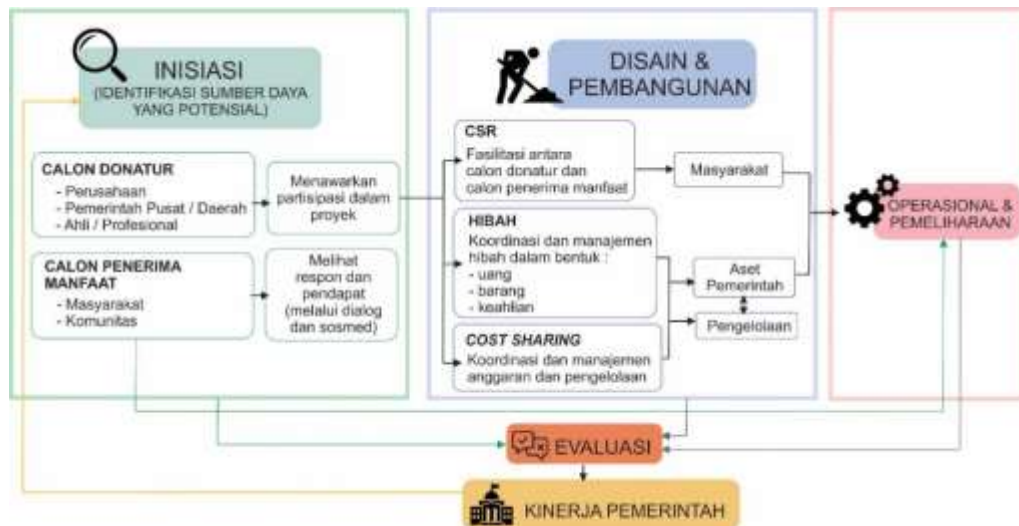
Komposisi atau struktur merupakan hal yang paling mempengaruhi komponen pemerintahan secara keseluruhan baik langsung maupun tidak langsung. Kuncinya terdapat pada tiga unsur yaitu kekuatan, kekuasaan dan hubungan dengan *stakeholders*. *Stakeholders* merupakan individu/kelompok/institusi yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, terpengaruh oleh kegiatan proyek dan akan merasakan kemanfaatan atau kehilangan terhadap suatu kondisi yang berubah maupun sama (Wai, Nitivattananon, & Kim, 2018). Masing-masing peran dapat bersifat sementara, berubah-ubah bahkan saling tumpang tindih. Sarana pemerintahan dapat berwujud formal maupun informal. Secara formal sarana pemerintahan dapat berupa aturan maupun rencana penyediaan yang bersifat mengikat seluruh unsurnya, sedangkan aspirasi, nilai-nilai sosial, adat budaya merupakan bagian dari alat pengaturan informal di ruang publik. Tugas pemerintah dalam tata kelolanya diterapkan melalui kegiatan koordinasi, perwujudan tempat (*place shaping*) dan pengelolaan anggaran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Komposisi atau struktur

Penyediaan dan pengelolaan taman-taman di Kota Bandung awalnya dilakukan dengan pola tradisional yakni oleh pihak pemerintah saja tanpa melibatkan pihak lain. Pola ini memiliki keterbatasan terutama dalam hal anggaran karena sumber dana hanya berasal dari satu pihak saja. Keterbatasan dana tersebut mengakibatkan penambahan RTH di Kota Bandung menjadi tersendat. Belajar dari hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan peluang untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dalam penyediaan taman tematik.

Penyediaan fasilitas publik dengan kolaborasi sangat membantu dalam pemenuhan target penyediaan taman tematik di Kota Bandung. Dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018, ditargetkan sebanyak 21 taman tematik akan dibangun (Pemerintah Kota Bandung, 2014).



Gambar 1. Skema Kolaborasi Penyediaan Taman Tematik Di Kota Bandung

Namun dengan adanya skema kolaborasi ini dapat melebihi target yakni hingga tahun 2017 telah terbangun sebanyak 30 taman tematik. Pemerintah Kota Bandung tidak hanya secara pasif menunggu tawaran bantuan dari pihak swasta melainkan secara aktif mengumpulkan bantuan dari swasta. Tema taman yang unik dan adanya transparansi keuangan oleh Pemerintah Kota Bandung mempengaruhi partisipasi swasta dalam penyediaan taman tematik.

Nururrohmah dan Suhirman (2016) menggambarkan skema kolaborasi penyediaan fasilitas umum yang melibatkan tiga pihak yakni pemerintah, masyarakat dan swasta (Gambar 1). Dalam skema tersebut belum memasukkan kolaborasi antar pemerintah seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan BBWS Citarum dalam penyediaan Taman Teras Cikapundung.

3.2 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Penyediaan taman tematik untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Kota Bandung merupakan tugas utama Pemerintah Kota Bandung. Program ini tidak hanya dilaksanakan oleh Pemkot Bandung saja namun juga melibatkan banyak aktor yakni donatur, pakar, komunitas, inisiator dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Pihak-pihak tersebut saling bekerjasama untuk dapat membuat program ini dapat terlaksana dengan baik (lihat Gambar 2).

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, dalam hal ini adalah penyediaan taman tematik. Penerapan sarana pemerintahan tersebut memiliki keterkaitan dengan struktur pemerintahan, tugas masing-masing pihak dan actor yang terlibat didalamnya.

- Aturan dan rencana penyediaan Tidak terdapat ketentuan teknis yang mengatur secara khusus dalam penyediaan taman tematik. Ketentuan teknis mengacu pada aturan umum seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal Taman Tematik mengacu pada Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Rencana penyediaan taman tematik terdapat pada *Masterplan* Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung tahun 2012-2032 yakni pada kegiatan peningkatan luas/kuantitas RTH publik (Pemerintah Kota Bandung, 2012). Indikasi program yang disebutkan adalah pengembangan taman-taman tematik pada beberapa lokasi yang telah disepakati dalam RTRW Kota Bandung 2011-2031 yakni wilayah Gedebage, Nagrog, Pasir Impun, dan Cicabe. Lokasi yang telah diarahkan pada *masterplan* RTH tersebut tidak sesuai dengan implementasinya karena pembangunan taman tematik terfokus di SWK (Sub Wilayah Kota) Cibeunying.

Target penyediaan taman tematik terdapat dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018.

Penyediaan taman tematik termasuk dalam program prioritas walikota yang tertuang dalam misi pertama yakni “Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas publik yang berkelanjutan (*sustainable*) dan nyaman”. Dalam RPJMD dinyatakan bahwa target penyediaan taman tematik selama 5 tahun adalah sebanyak 21 buah. Target yang terdapat pada RPJMD tersebut kemudian digunakan sebagai acuan RENSTRA pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD penanggung jawab penyediaan dan pengelolaan taman tematik yakni Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang pada tahun 2017 di restrukturisasi menjadi DPKP3.



Gambar 2. Skema Peran Masing-Masing Aktor dalam Penyediaan Taman Tematik di Kota Bandung

Keterangan:

1. Pemerintah Kota Bandung sebagai regulator, *owner*, pengelola dan *supervisor* menyediakan taman tematik untuk warga Kota Bandung.
2. Pemerintah pusat dalam wujud integrasi dengan pemerintah daerah serta kebersamaan dalam penyediaan ruang publik bekerjasama dalam penyediaan dan pengelolaan taman tematik.
3. *Private sector* sebagai partner pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk dana, barang maupun keahlian.
4. *Private sector* memberikan *public value* sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk CSR.
5. Masyarakat sebagai *user* memiliki hak untuk menggunakan dan berkewajiban memelihara taman yang telah dibangun.
6. Masyarakat membantu pemerintah turut dilibatkan dalam pemeliharaan taman, menyumbangkan ide, lahan dan pengawasan.
7. Komunitas membuat taman lebih aktif dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunitas.
8. Komunitas ikut membantu pemerintah sebagai pengelola taman.
9. LSM berperan memberikan *feedback* kepada pemerintah.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut disebutkan bahwa target penyediaan taman tematik di Kota Bandung sebanyak 21 taman dan taman skala RW sebanyak 1.563 taman dengan anggaran sebesar Rp 132 M (Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, 2013). Capaian kinerja pada tahun 2017 yakni sebanyak 30 taman tematik dan 120 taman RW. Capaian kinerja untuk penyediaan taman tematik telah melampaui target, namun tidak untuk taman skala RW. Penyediaan taman RW telah merata di 30 kecamatan namun belum merata di 150 kelurahan, begitu pula dengan taman tematik yang masih terfokus di satu wilayah.

• Lahan

Ketersediaan lahan menjadi kendala dalam pemerataan penyediaan taman tematik di Kota Bandung. Kriteria lahan yang dapat digunakan untuk taman tematik adalah lahan milik pemerintah, lokasinya strategis dan memiliki akses yang baik. Lahan yang tersedia merupakan taman-taman kota yang sejak dahulu sudah ada dan lokasinya sebagian besar terletak di pusat kota. Lahan yang terletak di wilayah lain selain di pusat kota sulit untuk diperoleh sehingga pembangunan taman tematik diprioritaskan pada lahan yang telah tersedia.

Kewenangan pembebasan lahan untuk RTH awalnya merupakan kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD). Dinas Pemakaman dan Pertamanan (Diskamtam) bertugas untuk mengisi lahan yang sudah ada dan dapat memberikan rekomendasi lahan kepada DPKAD. Namun mulai tahun 2017 bagian pertanahan sudah menjadi satu organisasi dengan pertamanan yakni dibawah DPKP3 sehingga koordinasi antar instansi seharusnya tidak menjadi kendala lagi. Terdapat usulan dari masyarakat untuk pembangunan taman tematik di wilayahnya melalui forum Musrenbang. Namun setelah di kroscek ternyata tanah yang diusulkan merupakan tanah milik pribadi sehingga digugat oleh pemilik lahan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja dan Anggaran DPKP3 Kota Bandung Tahun 2014-2017 (LKIP Diskamtam) 2014-2017

Sasaran		2014			2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran II. Meningkatnya kualitas RTH													
Indikator kinerja	kinerja	15,72%	12,58%	80,03%	36,42%	26,49%	72,73%	45,31%	37,44%	82,63%			
	Prosentase RTH berkualitas												
Prosentase RTH berkualitas	anggaran	36 Milyar	20 Milyar	55,83%	47,2 Milyar	39,6 Milyar	83,99%	91,1 Milyar	61,4 Milyar	67,44%			
Sasaran III. Meningkatnya kualitas taman di Kota Bandung													
Indikator kinerja	kinerja	13,15%	10,57%	80,38%	36,40%	22,53%	61,90%	37,38%	31,94%	85,45%			
	Prosentase taman dalam kondisi baik												
Prosentase taman dalam kondisi baik	anggaran	3,6 Milyar	9,4 Milyar	69,69%	22,1 Milyar	19,5 Milyar	88,02%	26,3 Milyar	17,7 Milyar	67,38%			
Sasaran V. Meningkatnya kualitas RTH di Kota Bandung													
Indikator kinerja	kinerja										45,50%	44,32%	97,41%
	Prosentase RTH yang berkualitas												
Prosentase RTH yang berkualitas	anggaran										99,9 Milyar		

- Anggaran

Pembiayaan taman tematik dapat dilakukan melalui 3 sumber pembiayaan yaitu:

1. APBD Kota Bandung

Penyediaan taman tematik melalui APBD Kota Bandung dilakukan pada pembangunan Taman Pasupati, Taman Lansia, Taman Musik, *Pet Park*, Taman *Superhero*, Taman *Fitness* dan Taman Fotografi. Taman-taman ini merupakan taman yang dibangun pada awal program taman tematik yang kemudian dapat menarik bantuan dari pihak swasta.

2. *Cost-sharing*

Penyediaan taman tematik dengan pembagian anggaran dilakukan pada taman-taman yang berlokasi di bantaran sungai seperti Cikapundung *Riverspot* dan Taman Teras Cikapundung. Pembagian anggaran dilakukan bersama dengan pemerintah pusat (BBWS Citarum) dan pengelolannya oleh Dinas Pengairan Kota Bandung.

3. Hibah dan/atau CSR

Penyediaan taman tematik di Kota Bandung tidak akan cukup bila hanya dibiayai oleh APBD sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam bentuk CSR maupun hibah. Pemberian bantuan tidak hanya dalam bentuk uang namun juga dalam bentuk barang maupun pemikiran.

Namun demikian, penggunaan anggaran untuk penyediaan dan pengelolaan RTH (termasuk penyediaan dan pengelolaan taman tematik dan taman RW) di Kota Bandung dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari penyerapan anggaran yang belum maksimal. Penggunaan anggaran pada tahun 2014-2016 rata-rata masih dibawah 70%, namun demikian capaian kinerja telah mencapai lebih dari 80% yang dapat dilihat pada Tabel 1.

- Sumber Daya Manusia (SDM)

SKPD yang ditugaskan mengelola taman tematik adalah Diskamtam yang pada tahun 2017 direorganisasi menjadi DPKP3. Bidang pertamanan terbagi menjadi tiga bagian yakni bagian pengembangan, bagian pembangunan dan bagian pemeliharaan. Diskamtam didukung oleh 284 pegawai negeri sipil dan 236 tenaga magang.

Dalam Renstra Diskamtam 2013-2018 disebutkan bahwa salah satu persoalan kelembagaan yang dihadapi adalah jumlah SDM yang besar namun yang berkompeten terbatas. Hal tersebut diatasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan RTH. Kerjasama dengan pihak lain yaitu dilakukan dengan pelibatan tenaga ahli dalam desain taman tematik, seperti desain Alun-alun Cicendo yang bekerjasama dengan Suryawinata Heinzelmann *Architecture and Urbanism (SHAU) Architects* dan desain *artwork / sculpture* oleh seniman muda ITB.

Masyarakat juga turut dilibatkan dalam pemeliharaan kebersihan dengan merekrut mereka menjadi tenaga kebersihan yang disebut sebagai Gober (*Go-Kebersihan*). Karena hal tersebut, Kota Bandung memperoleh Penghargaan Adipura yakni penghargaan tertinggi di bidang kebersihan lingkungan selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Manajemen pengelolaan taman dibuat dalam bentuk Tim Satgas yang bertugas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Guna efisiensi sumber daya manusia, teknologi dalam bentuk CCTV juga dimanfaatkan dalam pengawasan penggunaan taman (lihat Gambar 3). Penggunaan teknologi dapat mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga dapat mempercepat pengambilan tindakan.



Gambar 3. Pemanfaatan Teknologi CCTV dalam Pengelolaan Taman Tematik Guna Efisiensi SDM

3.4 Tugas Pemerintah

Tugas pemerintah dalam tata kelolanya diterapkan melalui kegiatan koordinasi, perwujudan tempat (*place shaping*) dan pengelolaan anggaran (Zamanifard dkk., 2018). *Place shaping* merupakan cara yang diupayakan otoritas setempat, dalam hal ini adalah pemerintah kota, dalam menggunakan pengaruh, kekuatan, kreativitas dan kemampuan mereka untuk menciptakan tempat yang menarik, layak dan aman sehingga masyarakat ingin beraktivitas didalamnya (Future Communities, 2009).

Dalam proses pembuatan tempat tentunya terjadi banyak hal didalamnya sehingga membutuhkan kepekaan terhadap hal-hal yang tidak hanya nyata namun juga abstrak. Dengan kata lain penyediaan fasilitas publik oleh pemerintah seharusnya bukan hanya persoalan fisik saja namun juga harus dapat membangun hubungan masyarakat didalamnya, dengan demikian tempat tersebut akan mendapatkan nilai lebih. Dalam penyediaan taman tematik, tugas pemerintah dalam tata kelolanya masuk kedalam setiap tahapannya yaitu sebagai berikut.

- Inisiasi

Pada tahap ini tata kelola pemerintah diterapkan pada kegiatan koordinasi dan perwujudan tempat. Pada awalnya program pembangunan taman tematik, ide atau konsep taman bersifat *topdown* dari pemerintah, namun saat ini konsep taman mulai melibatkan masyarakat dan komunitas melalui Musrenbang.

- Pembangunan

Pada tahap ini tata kelola pemerintah diterapkan pada kegiatan koordinasi dan pengelolaan anggaran. Pemerintah melakukan inovasi yakni bekerjasama dengan pihak swasta tidak hanya dalam pendanaan namun juga dalam penyediaan material dan desain.

- Operasional dan perawatan

Pada tahap ini tata kelola pemerintah diterapkan pada kegiatan koordinasi dan perwujudan tempat. Pengelolaan taman tematik melibatkan komunitas dan pengawasan juga melibatkan masyarakat. Namun sayangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya merawat fasilitas yang telah dibangun pemerintah masih rendah.

4. KESIMPULAN

Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan kota layak huni dengan melakukan kolaborasi bersama *stakeholders* lainnya untuk melakukan akselerasi terutama dalam hal penyediaan anggaran. Pemerintah Kota Bandung telah berupaya mewujudkan Bandung sebagai kota layak huni dengan memenuhi salah satu kriteria penilaian yakni ketersediaan taman tematik sebagai ruang terbuka publik. Upaya tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan yang berjenjang dari RPJMD hingga Renstra SKPD.

Kapasitas Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan taman tematik cukup baik terutama dalam hal penyediaan anggaran dan SDM. Secara komposisi, pemerintah setempat telah meninggalkan pola lama dan melakukan kolaborasi dalam penyediaan ruang publik. Pihak-pihak yang dilibatkan Pemerintah telah sudah melakukan inovasi dalam memenuhi tiga unsur yakni pemerintah, swasta serta masyarakat dengan proporsi yang seimbang (Nurrohmah dan Suhirman (2016)). Namun dalam hal sarana, ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama sehingga belum mampu untuk menyediakan taman tematik yang merata di seluruh wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan inovasi dalam mengatasi kendala ketersediaan lahan, seperti yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala keuangan dan SDM sehingga taman tematik dapat dijangkau secara merata oleh masyarakat Kota Bandung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azadi, H., Ho, P., Hafni, E., Zarafshani, K., & Witlox, F. (2011). Multi-Stakeholder Involvement and Urban Green Space Performance. *Journal of Environmental Planning and Management*, 54(6), 785-811. doi:<https://doi.org/10.1080/09640568.2010.530513>
- Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. (2013). *Rencana Strategis Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Tahun 2013-2018*. Bandung: Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.
- Dzhambov, A. M., & Dimitrova, D. D. (2014). Elderly Visitors of an Urban Park, Health Anxiety and Individual Awareness of Nature Experiences. *Urban Forestry & Urban Greening*, 13(4), 806-813. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.05.006>
- Evans, P. B. (2002). *Livable Cities: Urban Struggles for Livelihood and Sustainability*. Berkeley: University of California Press.
- Frick, H., & Mulyani, T. H. (2006). *Arsitektur Ekologis: Konsep Arsitektur Ekologis di iklim Tropis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Future Communities. (2009). Place Shaping. Diakses dari <http://www.futurecommunities.net/why/place-shaping-0.5> Maret 2018
- Humaida, N., Prasetyo, L. B., & Rushayati, S. B. (2016). Priority Assessment Method of Green Open Space (Case Study: Banjarbaru City). *Procedia Environmental Sciences*, 33, 354-364. doi:<https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.086>
- IAP. (2017). Indonesia Most Livable City Index 2017. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/1yQ6cJMLI4H7h_RsqqUbdurd9UMvzqqqX/view. Maret 10th 2018
- Kusumawanto, A., & Astuti, Z. B. (2014). *Arsitektur Hijau dalam Inovasi Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugraha, D. H., & Heston, Y. P. (2017). *Oase di Tengah Kota: Kota Ekologis dan Penyiapan RTH*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Nururrohmah, Z., & Suhirman. (2016). Shared-power Governance in Managing Common Pool Resources Case Study: Collaborative Planning to Manage Thematic Parks in Bandung City, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 465-476. doi:<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.102>
- Pemerintah Kota Bandung. (2012). *Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung tahun 2012-2032*. Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2014). *RPJMD Kota Bandung 2014-2018*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Ramdhani, S., Rushayati, S. B., & Prasetyo, L. B. (2016). Open Green Space Development Priority Based on Distribution of air Temperature Change in Capital City of Indonesia, Jakarta. *Procedia Environmental Sciences*, 33, 204-213. doi:<https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.071>
- Razak, M. A. W. A., Othman, N., & Nazir, N. N. M. (2016). Connecting People with Nature: Urban Park and Human Well-being. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 222, 476-484. doi:<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.138>
- Tan, P. Y., & Samsudin, R. (2017). Effects of Spatial Scale on Assessment of Spatial Equity of Urban Park Provision. *Landscape and Urban Planning*, 158, 139-154. doi:<https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.11.001>
- Wai, A. T. P., Nitivattananon, V., & Kim, S. M. (2018). Multi-Stakeholder and Multi-Benefit Approaches for Enhanced Utilization of Public Open Spaces in Mandalay city, Myanmar. *Sustainable Cities and Society*, 37, 323-335. doi:[10.1016/j.scs.2017.10.038](https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.10.038)
- Woolley, H. (2003). *Urban Open Spaces*. London & New York: Spon Press.
- Zamanifard, H., Alizadeh, T., & Bosman, C. (2018). Towards a Framework of Public Space Governance. *Cities*, 78, 155-165. doi:<https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.010>